

INKONSISTENSI HAKIM DALAM MELAKUKAN PENAFSIRAN NORMA HUKUM PADA UNSUR KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji *Inkonsistensi Hakim dalam Melakukan Penafsiran Norma Hukum pada Unsur Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*. Unsur kerugian keuangan negara memiliki posisi fundamental dalam pembuktian Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, praktik peradilan menunjukkan adanya variasi penafsiran yang signifikan antar hakim mengenai batasan kerugian, baik yang bersifat aktual, potensial, maupun yang berkaitan dengan kerugian perekonomian negara dan kerugian lingkungan. Inkonsistensi tersebut tampak pada sejumlah putusan yang memiliki karakteristik serupa tetapi menghasilkan pertimbangan yang berbeda, seperti pada perkara Surya Darmadi dan Harvey Moeis. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk inkonsistensi penafsiran hakim, menganalisis faktor penyebabnya, serta mengevaluasi dampaknya terhadap asas kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas pemberantasan korupsi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber data diperoleh melalui analisis putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inkonsistensi penafsiran menyebabkan ketidakpastian hukum, disparitas putusan, potensi perlakuan yang tidak setara, serta menurunnya legitimasi lembaga peradilan di mata publik. Temuan penting penelitian ini (*novelty*) adalah pemetaan menyeluruh terhadap variasi penafsiran unsur kerugian negara dalam perkara korupsi sumber daya alam serta rekomendasi pembentukan pedoman interpretasi oleh Mahkamah Agung melalui SEMA atau Perma agar tercipta standar penafsiran yang seragam. Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi bagi harmonisasi sistem penegakan hukum dan peningkatan integritas peradilan di Indonesia.

Kata kunci: Inkonsistensi Hakim, Penafsiran Hukum, Kerugian Keuangan Negara, Tindak pidana korupsi, Kepastian Hukum

INCONSISTENCIES AMONG JUDGES IN INTERPRETING LEGAL PROVISIONS REGARDING THE ELEMENT OF FINANCIAL LOSS TO THE STATE IN CORRUPTION OFFENSES

ABSTRACT

This research examines Judicial Inconsistency in Interpreting Legal Norms Related to State Financial Losses in Corruption Crimes. The element of state financial loss plays a fundamental role in establishing the elements of Articles 2 and 3 of Law No. 31 of 1999 as amended by Law No. 20 of 2001 on the Eradication of Corruption. However, judicial practice reveals significant variations in interpretation among judges regarding the boundaries of financial loss, whether actual, potential, or linked to economic loss or environmental damage. These inconsistencies are evident in several court decisions with similar factual patterns but divergent legal considerations, such as the Surya Darmadi and Harvey Moeis cases. The objective of this study is to identify the forms of judicial inconsistency, analyze their underlying causes, and evaluate their implications for legal certainty, fairness, and the effectiveness of corruption eradication. This research employs a normative juridical method using statutory, case, and conceptual approaches. Data were obtained through the analysis of court decisions, statutory regulations, and relevant academic literature. The findings reveal that inconsistent judicial interpretation generates legal uncertainty, sentencing disparity, potential unequal treatment, and diminished public trust in judicial institutions. The novelty of this research lies in providing a comprehensive mapping of interpretative variations regarding state financial loss in natural resource-related corruption cases and proposing the formulation of interpretive guidelines by the Supreme Court through a Circular Letter or Supreme Court Regulation to ensure consistent judicial interpretation. This research contributes to the harmonization of law enforcement practices and the strengthening of judicial integrity in Indonesia.

Keywords: *Judicial Inconsistency, Legal Interpretation, State Financial Loss, Corruption, Legal Certainty.*